

MAKRO

Pemerintah Bakal Revisi UU Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi bersama dengan menteri-menteri kabinet kerja sedang membahas usulan revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Ini ketenagakerjaan, rencana Undang-undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin (24/6).

Menurut Moeldoko tidak tertutup kemungkinan UU tersebut direvisi. Namun, Jokowi terlebih dahulu mendengarkan masukan baik dari para menteri maupun asosiasi pengusaha. "Kita dengerin suaranya teman-teman dari asosiasi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan rapat tertutup kali ini lebih fokus pada pembahasan pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi ingin implementasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan lebih cepat dan masif. "Ini kan artinya semua kementerian yang menangani urusan itu harus buat perencanaan konkret" terangnya.

Mengenai rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hanif menyebut perlu mendengar masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut nantinya menjadi bahan kajian di Kementerian Ketenagakerjaan. Hanif menyadari, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memang perlu dibenahi. Terlebih sudah banyak pasal dalam UU tersebut yang didorong ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ditinjau kembali.

"Kalau tidak salah mungkin sudah 32 kali di judicial review, kalau tidak keliru. Tentu ini menjadi kepentingan bersama untuk pastikan kita punya ekosistem naker yang lebih baik, sehingga investasi baik dalam dan luar negeri bisa mem-booster pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru," kata dia. Sebelumnya, Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apindo menilai UU ini perlu direvisi agar industri padat karya dapat bertumbuh di Tanah Air. ●bari

GABUNGAN BRT DAN LRT Pemerintah Kaji Penggunaan O-Bhan untuk Transportasi Massal

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT) bernama "O-Bahn", sebagai alternatif pilihan angkutan massal perkotaan di Indonesia. "Dengan semakin terbangunnya infrastruktur jalan, tentunya perlu dilakukan antisipasi agar masyarakat tidak memenuhinya dengan kendaraan pribadi. Caranya yaitu dengan mengoptimalkan angkutan massalnya," jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (23/6).

Menurut Budi, Kemenhub tengah berupaya mengoptimalkan prasarana dan sarana Transportasi Massal Perkotaan di Indonesia, dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak terjadinya kemacetan yang menjadi permasalahan serius di daerah perkotaan di Indonesia. Berbagai macam angkutan massal perkotaan telah dibangun seperti Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).

"Tahun 2019 ini adalah era Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki semua sarana dan fasilitas menyangkut angkutan umum. Kita juga harus cepat merespon karena beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai mengalami kemacetan," ujar Budi.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri menyampaikan seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak dikembangkan moda angkutan massal seperti misalnya : O-Bahn yang dapat dibangun dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan LRT. ●bari



PERESMIAN KCU TANGERANG CITY : Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Erwan Yuris (tengah) didampingi Kepala KCU Tangerang City Stephanie Kamajaya (kanan 2) , Kepala Kantor Wilayah XII Freddy Suliman (kiri 2) , Kepala Pengembangan Bisnis Cabang KCU Tangerang City Lita Dwiretno (kiri 1) , Kepala Operasi Cabang KCU Tangerang City Winawati Lily (kanan1) bertumpukan tangan bersama , saat meresmikan Kantor Cabang Utama (KCU) Tangerang City di kawasan bisnis Tangerang City, Tangerang, Senin (24/6).

Dominasi Impor Barang China Penuhi Pasar Domestik

Jakarta – Ketergantungan akan barang China tak bisa dianggap enteng. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Indonesia dari China dari Januari hingga Mei telah mencapai US\$18,03 miliar atau sekitar Rp254,2 Triliun. "Tiongkok masih menjadi negara asal impor terbesar dengan peran 29,31 persen atau US\$18,03 miliar," kata Kepala BPS Suharyanto di Kantor BPS Jakarta, Senin (24/6).

NERACA

Namun bila dibandingkan periode yang sama di 2018, nilai impor China ke Indonesia masih turun tipis. Dimana pada Januari-Mei 2018, impor barang China nilainya US\$18,36 miliar. Sementara itu, pada posisi kedua yang paling besar mencatatkan impor ke Indonesia ialah Jepang, dengan nilai US\$6,458 miliar, atau sekitar Rp91,06 triliun.

Sementara posisi ketiga ditempati oleh negara Thailand dengan nilai impor sebesar US\$3,29 miliar.

Pihaknya mengimbau kepada Pemerintah agar terus mengendalikannya pos tur neraca perdagangan termasuk diantaranya impor. Hal tersebut juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Secara total, kinerja perdagangan terhadap China mengalami defisit mencapai US\$8,48 miliar pada periode Januari-Mei 2019. Angka itu meningkat dari defisit Januari-Mei 2018 yang sebesar US\$8,11 miliar. Nilai ekspor Januari-Mei 2019 hanya sebesar US\$9,55 miliar. Padahal, ekspor periode yang sama tahun lalu mencapai US\$10,25 miliar.

Artinya, terjadi penurunan ekspor mencapai US\$700 juta dalam lima bulan pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, penurunan impor dari China ke Indonesia lebih rendah, yaitu hanya sekitar US\$330 juta dari US\$18,36 miliar menjadi US\$18,03 miliar. Suharyanto melihat penurunan ekspor yang lebih

tinggi dari impor terjadi karena ketegangan hubungan antara China dengan AS. Kedua negara saling melempar kebijakan peningkatan tarif bea masuk impor untuk berbagai produk asal masing-masing negara. Hal tersebut, katanya, membuat kinerja industri di Chinamenurun. Bahkan, pertumbuhan ekonomi negara tersebut sudah melambat dari 6,8 persen pada kuartal I 2018 menjadi 6,4 persen pada kuartal I 2019. "Kalau ada perlambatan (pertumbuhan ekonomi di China), pasti pengaruh permintaan (barang ke Indonesia)," ujarnya.

Penurunan kinerja ekspor yang meningkatkan posisi defisit dagang Indonesia dari China juga terjadi karena penurunan harga komoditas di pasar internasional. ●bari

PUPR Tetapkan Harga Jual Tertinggi Rumah Subsidi

NERACA

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan telah menandatangani Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS-M/2019 tentang Batasan

Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Menteri PUPR dalam keterangan tertulis, Senin (24/6), menyatakan di dalam Keputusan Menteri PUPR yang ditandatangani pada 18 Juni 2019 tersebut terdapat empat butir keputusan. Pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling

tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PM-

K.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga, pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum pertama. ●bari

PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

PENGUMUMAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPST dan RUPS LB ("Rapat"), pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Juni 2019
Tempat : Kantor Perseroan Gedung Graha Irama, Lantai 2-E Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 10117 – 1053 WIB

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPS LB:

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

- Direktur Utama : Tuan JAP IRIWAN SUSANTO
- Direktur Independen : Nyonya RINAWATI
- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA HANDAYANI

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 656.743.200 saham atau 98,31% dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Seluruh Mata Acara: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Terahmadjar, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasiya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.

Keputusan RUPS LB:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menunjukkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menubuh, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang dan disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pembentahan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2019
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.
Direksi

RINGKASAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GUNA TIMUR RAYA TBK (Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, di Swiss-Belinn Kemayoran Hotel, Komplek Springhill, Jalan Benyamin, Sulo Blok D6, Kemayoran, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 14.17 s/d pukul: 14.52 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018;
 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019;
 4. Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019; dan
 5. Pembahasan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang; Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang hadir adalah:

Direksi:
Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

- bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 295.043.000 saham atau mewakili 67,83% dari 435.000.000 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.
 2. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2018 yang sebesar Rp. 1.337.105.085,- adalah sebagai berikut:
 - a. Rp 13.371.051,- atau 1% disisihkan untuk dana cadangan.
 - b. Perseroan tidak membagikan dividen tunai.
 - c. Dan sisa Laba sebesar Rp 1.323.734.034,- akan dicatangkan sebagai saldo laba.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2019, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya;
 - b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut."
 4. Menyetujui:
 - a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO:

Pada Tgl 15 Mei 2018 Perseroan dan PT Daya Armada Kita telah menandatangani Perjanjian Pengadaan Kendaraan sejumlah 70 Unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 69.550.000.000,-. Perseroan telah memberikan Uang Muka sebesar Rp. 29.111.330.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2018 Perseroan telah merealisasikan pembelian armada sebanyak 25 Unit dan sisa uang muka sebesar Rp. 18.859.000.000,-.
 6. Keputusan rapat untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), sedangkan untuk mata acara rapat kelima, hanya penyampaian laporan penggunaan realisasi dana IPO, tidak diadakan pemungutan suara;

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 25 Juni 2019
Direksi Perseroan

BURSA & FINANSIAL

Amran Sulaiman Dianggap Sukses Duduki Kursi Menteri Pertanian

NERACA

Jakarta – Jika tak ada aral melintang, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memimpin Indonesia. Jokowi membutuhkan susunan pembantu yang andal untuk membantunya di lima tahun mendatang.

Dari komposisi kabinet kerja yang kini berada di ujung masa pemerintahan, siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan hangkang? Jawaban akan jadi lebih mudah jika ukurannya adalah integritas, untuk menjauhkan kabinet dari rongrongan praktik korupsi.

Di awal-awal pembentukan kabinet Kerja pada 2014 silam, Jokowi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas dan integritas. Terlebih 3 tahun terakhir kepemimpinannya, pemerintahan Jokowi-JK mendapat stempel WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Memimpin sebuah Kementerian untuk mendukung program pemerintah sekaligus menyelenggarakan dengan prinsip clean government bukanlah perkara sepele.

Salah satu Kementerian yang berhasil membalikkan keadaan, adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Sepuluh tahun lamanya predikat WTP tak mampir di Kementerian yang mengurus hajat petani dan peternak untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ini.

Tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

Baru saat berada di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, Kementan mendapat opini WTP. Tak tanggung-tanggung Kementan menorehkan sejarah baru dengan mengondolnya selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2016, 2017, dan terakhir 2018 yang baru saja diumumkan beberapa waktu lalu.

Dalam Rapat Kerja Bersama Mentan belum lama ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena malah mengumpamakan Amran layaknya pemain sepakbola kaliber dunia - bintang klub Juventus Cristiano Ronaldo, atau Lionel Messi di Barcelona. Menurut Michael, hanya bintang sepakbola dunia yang mampu mencetak hat trick. "Ibarat sepakbola, Amran itu sekaliber Messi dan Ronaldo yang merupakan tokoh utama kebangkitan tim sepakbola di klub dan negaranya," tandasnya, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Jokowi sempat mengatakan bahwa setiap periode membutuhkan karakter menteri yang berbeda sesuai tantangan yang ada. Kali ini ia membutuhkan seorang eksekutor buat mengisi pos menteri. "Menurut saya, yang kita butuhkan sekarang ini adalah karakter menteri yang eksekutor. Eksekutor kuat, kuat di eksekusi," katanya seperti dikutip Kompas.com.

Keinginan Jokowi sejalan dengan pendapat pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB), Rachmat Pambudy. Menurutnya sektor pertanian memerlukan pemimpin tangguh, memiliki gagasan besar serta kemampuan manajemen yang baik. Kriteria ini dimiliki Amran yang telah memimpin Kementan selama 4 tahun terakhir di Kabinet Kerja.

"Mentan Amran adalah pelopor dalam menciptakan program pengembangan infrastruktur pertanian seperti embung, irigasi, jalan desa dan ekstensifikasi pertanian peternakan. Bahkan, dia juga dikenal sebagai penggebrak dalam mencetak sawah dan kebun," ujar Pambudy.

Amran, lanjut Pambudy, juga berjasa atas pengembangan jagung secara besar-besaran. Pengembangan bawang merah, bawang putih, sapi daging dan ayam buras dalam program Sapi Indukan Wajib Bunting (SI-WAB).

"Baru di zaman Pak Amran, beras, jagung, kedelai, gula dan bawang malah ekspor ke luar negeri," katanya. Saat upacara peringatan hari Krida Pertanian Jumat (21/6) lalu, Amran Sulaiman menyampaikan rasa terimakasih sekaligus permohonan maaf pada seluruh jajaran di Kementerian Pertanian (Kementan), karena kerap kali mengganggu hingga larut malam untuk melakukan koordinasi program-program kerja Kementan.

Amran bersyukur semangat kerja yang selama ini ia bangun bersama seluruh insan Kementan, telah membuahkan banyak pencapaian. Di antaranya kinerja ekspor produk pertanian yang meningkat, stok beras di tanah air yang melimpah, sehingga harga bahan pokok terkendali di Ramadan dan hari raya Idul Fitri lalu.

"Kementerian pertanian juga mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hadir datang langsung ke sini. Kemarin kami presentasi di Istana, yg dipimpin ketua Wantimpres, dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pertanian tanpa kecuali," ujarnya. ●bari

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILIHAN

Dengan ini mengumumkan kepada seluruh Kreditor dan/atau Pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan Terbatas **PT. ARBA PROPERTINDO**, berkedudukan di Jakarta Selatan, bahwa telah diputuskan rencana pengalihan sebagian besar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas **PT. ARBA PROPERTINDO** kepada Pihak lain.

Semua tagihan atau klaim dari Kreditor atau Klaim dari Kreditor Perseroan maupun Pihak lain yang langsung berkepentingan atas rencana pengalihan sebagian besar saham dimaksud harus diajukan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini dan disampaikan ke alamat:

Graha Simatupang Tower 2C II.4, Jl. Tb. Simatupang Kav. 38, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telip: 021-29415959
Fak: 021-29415959

Pengumuman ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 40/2007.

Jakarta, 25 Juni 2019
Direksi
PT. ARBA PROPERTINDO

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Trisula International Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 10 Juli 2019 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat.

Jakarta, 25 Juni 2019
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk.
Direksi